DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali (2002). Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan. Sosiologis) Gunung Agung. Jakarta.
- Bagir Manan & Kuntana Magnar (2017). Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia. Edisi Revisi. PT. Alumni. Bandung.
- Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2016). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Gadjah Mada University Press.
- Harahap, M. Y. (2008). Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Ed. 2). Sinar Grafika.
- Harsono, B. (2003). Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya (Jilid 1). Djambatan.
- Harsono, B. (2008). Hukum Agraria Indonesia. Djambatan.
- Harsono, B. (2008). Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah. Citra Mandiri.
- Harsono, B. (2016). Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya. Djambatan.
- Laritmas & Rosidi (2024). Teori-teori Nergara Hukum. Marchant Label. Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- Ismaya, S. (2013). Hukum Administrasi Pertanahan. Graha Ilmu.
- Lubih, Y., & Lubis, R. (2010). Hukum Pendaftaran Tanah. Mandar Maju.
- Margono, (2019). Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Keputusan Hakim. Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group.

- Muhammad, A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum (1st ed.). Citra Aditya Bakti.
- Parlindungan, A. P. (1990). Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria. Mandar Maju.
- Parlindungan, A. P. (1999). Pendaftaran Tanah di Indonesia. Mandar Maju.
- Salim HS. (2011). Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus. Sinar Grafika.
- Santoso, U. (2010). Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah. Kencana PrenadaMedia Group.
- Santoso, U. (2012). Hukum Agraria Kajian Komprehensif. Kencana PrenadaMedia Group.
- Santoso, U. (2016). Sengketa Pertanahan & Strategi Penyelesaiannya. Kencana PrenadaMedia Group.
- Santoso, U. (2019). Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah. Kencana.
- Sihombing, B. F. (2015). Sertipikat Kepastian Hukum Hak Atas Tanah. Nuansa Aulia.
- Sudikno Mertokusumo (1993). Hukum acara perdata Indonesia. Edisi, Ed.4, cet.1. Penerbitan, Yogyakarta.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Rajawali Pers.
- Soemitro, R. H. (1990). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri (Cet. 4). Ghalia Indonesia.
- Soerodjo, I. (2011). Hukum Pendaftaran Tanah. Laksbang Pressindo.
- Subawa, M., Giri, N. P. N. S., & Hermanto, B. (2024). Kapita Selekta dan Filsafat Ilmu Hukum Kenotariatan Kontemporer Indonesia. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Sutedi, A. (2007). Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya (Cet 1). Sinar Grafika.
- Sutedi, A. (2013). Problematika Hukum Seputar Pendaftaran Tanah. Raih

Asa Sukses.

Sutedi, A. (2018). Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya. Sinar Grafika.

Syamsudin, M. (2007). Operasionalisasi Penelitian Hukum (1st ed.). Raja Grafindo Persada.

Tehupeiory, A. (2012). Pentingnya Pendaftran Tanah di Indonesia. Raih Asa Sukses.

B. Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pelayanan Publik dan Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

C. Sumber Lainnya

- Amanda, A. T. (2020). Perbedaan dan Persamaan Pendaftaran Tanah Sistematik dan Sporadik. Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia, 1(1), 65-73.
- Ananda, R. S., Bachtiar, & Efendi, Y. (2019). Implementasi Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sporadik Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Soumatera Law Review, 2(2), 254-268.
- Astuti, W. T. (2020). Analisis Kendala Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sporadik di Kabupaten Boyolali. Recital Law, 3(1), 52-63.
- Bustami, C. (2017). Dasar Pembuktian Hak Lama Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Menurut PP No. 24 Tahun 1997. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 19(1), 65-82.
- Bha'iq Roza, 2023. Perlindungan Hukum dan Keadilan dalam Musyawarah Ganti Rugi Pengadaan Tanah. 26-31.
- Faelani, R., Rivai, R., & Zurnetti, A. (2020). Problematika dalam Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sporadik di Kantor Pertanahan Kota Padang. Jurnal Esensi Hukum, 2(2), 95-105.
- Hafidah, S. (2018). Analisis Yuridis Mengenai Kekuatan Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah dalam Sistem Pendaftaran Tanah Menurut PP No. 24 Tahun 1997. Lex Crimen, 7(3), 103-110.
- Hamzah, M. L. (2020). Hambatan Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sporadik di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar. Jurnal Pepatudzu, 16(1), 62-71.
- Harahap, M. Y. (2008). Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Ed. 2). Sinar Grafika.
- Lukman, F. A., Disemadi, H. S., & Prayogo, R. A. (2018). Identifikasi Permasalahan Yuridis Dalam Proses Pendaftaran Tanah Sporadik di Kantor Pertanahan Kota Semarang. Law Reform, 14(1), 145-157.
- Mahardika, M., Suartha, I. D. M., & Arini, D. G. D. (2018). Implikasi Yuridis Asas Nemo Plus Juris Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Yang Belum Terdaftar. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, 3(1), 123-134.

- Manurung, M. (2017). Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 di Kantor Pertanahan Kota Medan. Jurnal Ilmiah Advokasi, 5(1), 93-102.
- Nugraha, R. Z. (2013). Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi Terhadap Kepastian Hukum Obyek Hak Atas Tanah di Kota Samarinda. Jurnal Beraja Niti, 2(11).
- Nurpitasari, L. (2021). Wujud Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997. ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata, 7(1), 49-64.
- Saad, S. (1997). Memahami Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 4(4).
- Sajidin, S. (2021). Optimalisasi Peran Aparatur Kelurahan Dalam Proses Pendaftaran Tanah Sporadik Untuk Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan. Widya Bhumi, 1(1), 41-52.
- Sanjaya, W. (2023). Dampak Kebijakan Satu Peta/One Map Policy di Bidang Pertanahan Terhadap Sertipikat Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia. LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria, 2(2), 215–231.
- Sari, D. R. (2018). Eksistensi Girik sebagai Alat Bukti Hak Atas Tanah yang Belum Terdaftar. Jurnal Repertorium, 5(1), 48-57.
- Silviana, A. (2012). Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Melaksanakan Pendaftaran Tanah. Pandecta Research Law Journal, 7(1).
- Susanti, E. (2020). Sengketa Tanah di Indonesia: Penyelesaian Hukum dan Alternatif Solusi. Jurnal Ilmu Hukum, 12(1).
- Sutendi, A. (2008). Urgensi Pendaftaran Tanah Dalam Memberikan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah. Jurnal Hukum & Pembangunan, 38(3), 430-445.
- Utama, Y. J., Purnomo, E., & Handayani, T. (2019). Peran dan Tanggung Jawab PPAT dalam Proses Pendaftaran Tanah Pertama Kali Sporadik (Studi di Kabupaten Banyumas). Notarius, 12(1), 109-122.
- Widiastuti, N. P. E., Ujianti, N. M. P., & Suryani, L. P. (2021). Analisis

Perbandingan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah antara Sporadik dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Jurnal Preferensi Hukum, 2(1), 71-75.